

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktifitas normal kehidupan masyarakat yang terjadi akibat perilaku perbuatan manusia maupun akibat anomali peristiwa alam (Sigit, 2018). Menurut UU No: 24 Tahun 2007 bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor dari manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat risiko bencana yang tinggi di dunia. Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk negara paling rawan terhadap bencana gempa bumi di dunia (Rizky, 2019). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia berada pada cincin api (*Ring of Fire*) yakni pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga jika terjadi pergerakan pada salah-satunya maka akan dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi (BNPB, 2019).

Gempa bumi datang secara tiba-tiba (*Sudden Onset*) dan dampaknya bisa sangat luas, tidak terkecuali wilayah padat perkotaan menjadi ancaman bencana alam yang berpotensi merusak terbesar di Indonesia. Hampir setiap

tahun, setidaknya kurang lebih 3 kali gempa berkekuatan 7 SR atau lebih terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur atau lingkungan (PMI,2016). Tercatat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2004-2018) Indonesia mengalami 240 kali gempa bumi berskala besar dan 14 kali tsunami yang berdampak terhadap 4 juta lebih kehidupan masyarakat (BNPB, 2019).

Sepanjang sejarah tercatat gempa bumi dan tsunami di Aceh merupakan bencana paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diterjang gempa besar dengan kekuatan 9,3 SR yang disertai dengan tsunami pada 26 Desember 2004 yang mengakibatkan 130 ribu lebih korban jiwa dan 37 ribu orang hilang. Banyaknya korban jiwa disebabkan rakyat Aceh terutama yang berada di pinggir pantai tidak mengetahui bahwa setelah gempa dahsyat akan menimbulkan gelombang tsunami (Effendi, 2017)

Sumatera Barat memiliki 7 segmen patahan yang sangat beresiko untuk terjadi gempa bumi dan berdampak langsung terhadap masyarakat bila patahan pada segmen-segmen di daratan tersebut bergerak (BPBD Sumbar, 2019). Sumatera Barat menjadi fokus perhatian pemerintah dan para ahli karena berpotensi diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan hingga 8,9 SR yang dapat memicu gelombang tsunami khususnya daerah Mentawai Megathrust. Peneliti LIPI, menyebutkan rentetan kejadian gempa yang terjadi di Mentawai, Sumatera Barat, pada 2-5 Februari 2019 berpotensi mengakibatkan terjadinya gempa 8,9 SR di wilayah itu yang mana pola

tersebut sama dengan gempa Aceh 2004 silam. Peneliti menambahkan, siklus gempa Mentawai Megathrust berkisar antara 200-300 tahun dimana gempa besar terakhir yang terjadi pada segmen itu diperkirakan pada 1797 yang artinya tahun 2019 diyakini memasuki puncak siklus tersebut (Naldi E, 2019).

Sepanjang tahun 2004-2018, kawasan Sumatera Barat telah diguncang gempa bumi sebanyak 19 kali dimana 2 diantaranya disertai dengan tsunami. Berdasarkan data yang tercatat pada DIBI dari 1 Januari 2019-31 Maret 2019, Sumatera Barat telah mengalami gempa bumi sebanyak 3 kali dimana jumlah tersebut merupakan kejadian gempa bumi terbanyak dibandingkan daerah lainnya di Indonesia (BNPB, 2019)

Kota Padang merupakan salah satu daerah pesisir Sumatera Barat yang memiliki risiko tinggi terjadi gempa bumi dan tsunami. Menurut BPBD Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir ini Kota Padang mengalami peningkatan kejadian gempa dengan indeks peningkatan sebesar 0,866 yang termasuk pada kelas tinggi (BPBD Sumbar, 2019). Selama 15 tahun terakhir ini (2004-2018), Kota Padang telah mengalami 4 kali kejadian gempa bumi yang merusak, salah satunya adalah gempa bumi yang terjadi pada 30 September 2009 (Setiyono U, 2019).

Gempa besar dengan kekuatan 7,6 SR pada tanggal 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB mengguncang Kota Padang dan beberapa daerah lainnya yaitu Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan hingga Pasaman Barat. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, peristiwa tersebut menelan korban jiwa sebanyak 383 orang, 431 orang luka berat, 771 orang

luka ringan. Selain itu, gempa tersebut juga mengakibatkan banyaknya kerusakan fisik seperti rumah, tempat ibadah, sarana kesehatan, sekolah dan lainnya (Sampaguita S, 2013).

Menurut Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, Pada Kelurahan Pasie Nan Tigo ditemukan 2.000 Ha desa/kelurahan dengan rawan banjir, dan 2.512.000 Ha desa/kelurahan dengan rawan Tsunami, dan 2.512.000 Ha desa/keluarahan dengan rawanjalur gempa. Pada saat survey yang dilakukan pada Desember 2021 di RW10 kelurahan Pasie Nan Tigoditemukan, dan berdasarkan hasil wawancara ke beberapa warga, warga mengatakan sering terjadi bencana seperti gempa.

Bencana yang terjadi menggambarkan pentingnya kapasitas semua sektor di bidang kesiapsiagaan bencana. Kegiatan sosialisasi tentang bencana gempa bumi dan tsunami pernah dilakukan, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pada Desember 2021 mahasiswa profesi Unand melakukan Praktik keperawatan bencana mulai dari memberikan edukasi tentang mitigasi bencana sampai dengan melakukan simulasi gempa bumi untuk wilayah kelurahan pasie nan tigo khususnya di RW 10.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu: kegiatan pra bencana, kegiatan saat terjadi bencana, kegiatan pasca bencana. Kegiatan pasca bencana (*post event*) berupa *emergency response* dan *recovery* lebih banyak dilakukan dari pada kegiatan sebelum bencana berupa *disaster reduction/mitigation* dan *disaster preparedness*. Padahal kegiatan pada tahap pra bencana sangatlah penting

karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana dapat berupa kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini (Kemhan RI, 2016).

Melihat adanya potensi bencana gempa bumi besar di Kota Padang khususnya di kelurahan Pasie Nan Tigo, pemerintah gencar melakukan upaya pengurangan risiko bencana salah satunya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Menurut Nick Carter (1991), kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna dimana tindakan kesiapsiagaan dapat berupa penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil (Hidayati D, 2016).

Salah satu faktor timbulnya banyak korban jiwa ketika terjadinya bencana disebabkan karena kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih kurang. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu : 1) pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana, 2) kebijakan dan panduan, 3) rencana untuk keadaan darurat bencana, 4) sistem peringatan bencana, 5) kemampuan untuk mobilisasi sumber daya (Aini & Husna, 2017)

Kesadaran masyarakat akan pengetahuan dan sikap tentang bencana dimana penduduk di kawasan pesisir berada di sebuah daerah yang rawan gempa dan tsunami, mengenali karakteristik bahaya gempa tsunami, dan tahu

bagaimana bertindak jika gempa dan tsunami terjadi di kawasan mereka. Rencana tanggap darurat terkait bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kemungkinan bencana yang dapat terjadi di daerahnya (Maghfiroh, 2008).

Hal yang tidak kalah penting yakni adanya sistem peringatan bencana, merupakan sebuah sistem peringatan dini yang sudah terbentuk dan berfungsi. Suatu sistem komunikasi antara pusat peringatan dini dan penduduk kawasan rawan bencana yang memungkinkan penduduk di kawasan pesisir menerima peringatan bencana sedini mungkin sebelum bencana menghantam (Lestari, 2018).

Selain itu mobilisasi sumberdaya menjadi faktor yang sangat krusial baik itu sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya pendanaan dan prasarana yang harus dikelola dengan baik dalam keadaan darurat bencana. Jika setiap parameter kesiapsiagaan telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat hal ini akan dapat meminimalisir dampak dari bencana terutama gempa bumi dan tsunami yang akan terjadi (Wulansari *et al*, 2017).

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana sehingga dikembangkan upaya peningkatan kesiapsiagaan sebagai salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. LIPI telah menetapkan tiga *stakeholders* utama yang mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi *key players* dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang terdiri dari individu/rumah tangga, komunitas sekolah dan pemerintah (Hidayati D, 2016).

Masyarakat merupakan korban sekaligus ujung tombak penanggap pertama situasi krisis kesehatan atau bencana di Indonesia, yang mengancam jiwa atau kesehatan mereka. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaannya baik dari segi individu ataupun rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat (KemenkesRI, 2015).

Mempersiapkan kader siaga bencana adalah salah satu tindakan promotif dan preventif yang bisa dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif lintas sektoral. Kelompok Kader Siaga Bencana (K2SB) adalah masyarakat yang berfungsi untuk mencegah gawat darurat dan bencana meliputi kesiagaan masyarakat, pencegahan dan mitigasi atau penjinakan kejadian gawat darurat dan bencana, serta berfungsi pula untuk reaksi cepat penanganannya di bidang kesehatan (Welly, 2021). Sesuai dengan hasil diskusi bersama warga setempat meminta untuk dibentuknya kader siaga bencana di Pasie Nan Tigo khususnya pada RW 10. Kader Siaga Bencana merupakan organisasi *Safe Community* yaitu keadaan aman dan sehat yang tercipta oleh peran aktif masyarakat termasuk swasta, profesi dan pemerintah yang bersinergi dalam penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana. Hakekat *Safe Community* adalah upaya oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat didorong oleh pemerintah sebagai fasilitator menuju terciptanya kondisi sehat dan aman (BNPB, 2014).

Kader dapat dikatakan belum secara resmi dimasukkan ke dalam rencana manajemen darurat bencana, tapi dengan adanya bukti dari upaya bantuan bencana pada kejadian Topan Nargis di Myanmar tahun 2008,

kejadian banjir di Pakistan tahun 2010, dan kejadian Topan Haiyan di Filipina tahun 2013 menunjukkan bahwa kader dapat memainkan peran penting dalam respon darurat saat bencana. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karla Fredricks di Nepal, Karla menyebutkan bahwa FCHV (Female Community Health Volunteer) berperan penting dalam mengurangi dampak negatif dari gempa bumi yang terjadi di Nepal tahun 2015, baik saat bencana dan masa pemulihan. Dalam keadaan saat bencana, FVHC memberikan respon darurat yang baik seperti membantu masyarakat membangun tempat pengungsian, membantu merawat korban, dan memberikan dukungan kepada para korban serta membantu memulihkan kesehatan mental masyarakat (Fredricks et al., 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Keith Nicholls di Amerika Serikat, kader juga dapat berperan dalam kesiapsiagaan bencana seperti memberikan penyuluhan mengenai bahaya yang ditimbulkan dari bencana, memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat selama dan setelah keadaan darurat (Picou & Lowman, 2015). Keith Nicholls juga menyebutkan bahwa peran kader tersebut dapat dilakukan karena adanya modal sosial yang terbangun antara kader dengan masyarakat dimana modal sosial tersebut dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana (Picou & Lowman, 2015). Karena belum adanya kader yang bergerak khusus dalam bencana maka perlunya dibentuk kader bencana dalam mengurangi resiko bencana.

Dalam upaya antisipasi maupun menangani keadaan bencana maka peran kader dianggap sangat penting. Salah satu peran kader saat terjadi gempa adalah tanggap darurat, kader selalu terlibat dalam penyelamatan baik nyawa maupun harta benda, oleh karena itu pengetahuan dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami sangat bermanfaat bagi kader.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kesiapsiagaan kader siaga bencana Rw 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo Dalam Menghadapi Resiko Kejadian bencana gempa bumi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian pada Karya Ilmiah Akhir ini adalah“ Bagaimana Kesiapsiagaan Kader Siaga Bencana Di RW 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo Dalam Menghadapi Bencana AlamGempa Bumi ?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui tingkatkesiapsiagaan kader siaga bencana di RW 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo dalam menghadapi bencana alamgempa bumi.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan kader siaga terhadap bencana gempa bumi di RW 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

- b. Mengetahui kebijakan dan panduan kesiapsiagaan kader siaga terhadap bencana gempa bumi di RW 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo.
- c. Mengetahui rencana untuk keadaan darurat bencana kesiapsiagaan kader siaga terhadap bencana gempa bumi di RW 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo.
- d. Mengetahui sistem peringatan bencana kesiapsiagaan kader siaga terhadap bencana gempa bumi di RW 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo.
- e. Mengetahui mobilisasi sumber daya kesiapsiagaan kader siaga terhadap bencana gempa bumi di RW 10 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pelayanan Keperawatan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan ataupun sebagai informasi bagi objek penelitian sejauh mana kesiapan kader siaga bencana dalam menghadapi bencana alam gempa bumi.

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti dasar yang digunakan dalam pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dalam melihat sejauh mana kesiapan kader siaga bencana dalam menghadapi bencana alam gempa bumi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembandingan untuk penelitian berikutnya dalam menghadapi bencana alam gempa bumi.

